

## Pengaruh Inventarisasi Aset Tetap Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Legal Audit sebagai Variabel Intervening (Wilayah Study Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung)

*Effect Regional Fixed Asset Inventory of Quality Financial Statements with Intervening Variables is Legal Audit.*

*(Case Study at Bandung District Government)*

### Imas Sukmawati

Politeknik Negeri Bandung (D4 – Akuntansi Manajemen Pemerintah/Akuntansi)

E-mail: imas.sukmawati.amp16@polban.ac.id

### Endah Dwi Kusumastuti

Politeknik Negeri Bandung (D4-Akuntansi Manajemen Pemerintahan/Akuntansi)

E-mail: endah.dwik@polban.ac.id

### Suji Abdullah Saleh

Politeknik Negeri Bandung (D4-Akuntansi Manajemen Pemerintahan/Akuntansi)

E-mail: suji.abdullah@polban.ac.id

---

**Abstract:** *This research aims to find out and evaluate the implementation of Regional Fixed Asset Inventory with audit activities that will impact the quality of financial statements. This research was conducted in the Bandung Regency Government using quantitative research methods with steps in this research namely by disseminating primary and secondary data (Questionnaire) in the form of The Examination Results Report (LHP) of BPK RI on the Financial Report of Bandung District Government in fiscal year 2015-2019. The research sample was selected by purposive sampling method which is the user of assets in 30 Government Agencies. With the expected data analysis results all variables have a positive effect. However, after data processing using SmartPLS software version 3.0 that the Inner Model test showed one of the three unproven hypotheses, among them the Legal Audit variable (Z) did not significantly affect the Financial Report Quality (Y) variable. However, in general the achievement of Regional Fixed Asset Inventory against Legal Audit and Implications on the Quality of Financial Statements is said to be good with one thing still to be improved and developed.*

**Keywords:** *Inventory of assets; Legal Audit; Quality of Financial Statements*

---

## 1. Pendahuluan

UU No. 23 Thn 2014 merupakan perubahan kedua dari UU mengenai PEMDA yang mengharuskan setiap dari provinsi, kabupaten dan kota yang ada di Negara Indonesia untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Salah satunya diberikan kewenangan dalam mengelola aset tetap daerah yang dimilikinya secara optimal. Faktor penentu kinerja suatu pemerintahan yang baik merupakan bagian dari pengelolaan aset tetap daerah. Yangmana terdapat pada peraturan tentang pengelolaan aset tetap daerah yang transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku sampai pada kondisi sekarang, dan pernyataan tersebut tercantum dalam PP No. 27 Tahun 2014

Untuk saat ini peranan yang sangat penting berada pada kedudukan pemerintahan daerah sehingga dalam kegiatan pembangunan daerahnya dalam melaksanakan pengelolaan aset tetap daerah. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga mewajibkan pengguna barang dalam hal ini Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan barang milik daerah sekurang- kurangnya satu kali dalam jangka waktu lima tahun. Salah satu bentuk penerapan dari pengelolaan aset yaitu inventarisasi, yang seharusnya dilaksanakan dengan baik dan benar, serta adanya suatu system yang dapat mengendalikan secara terintegrasi pengelolaan aset tetap daerah.

Menurut Undang- undang Nomor 23 Thn 2014 mengenai PEMDA Pasal 1 ayat 39 serta PP No. 27 Thn 2014 mengenai Pengelolaan BMN/BMD Pasal 1 ayat 2, dan penjelasan yang lebih spesifik termuat pada Permendagri Nomor 19 Thn 2016 bahwa yang dimaksud dengan BMN yaitu semua barang yang didapatkan berasal dari biaya APBN atau berasal dari perolehan lain- lain yang sah. Klasifikasi aset tetap daerah meliputi: tanah, Gedung dan bangunan irigasi dan jaringan, jalan, aset tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaann.

Asset tetap daerah yang dimiliki daerah harus dilakukan secara, efektif, efisien dan ekonomiss dalam pengelolaanya, sehingga dapat terjaganya aset tetap daerah dengan baik dan aman serta penggunaannya dapat dimaksimalkan, sehingga menurut PERMENKEU Nomor 109/PMK.06/2009 merupakan sebuah pedomann dalam melaksanakan kegiatann inventarisasi, penilaiann, dan pelaporan dalam rangka menertibkan BMD yang bertujuan supaya dapat memberikan gambaran tentang pengamanan barang daerah, kejelasan status kepemilikan dari kekayaan daerah dan pengoptimalan pemanfaatan asset.

Pernyataan tersebut merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam kegiatan legal audit. Legal audit merupakan satu lingkup pekerjaan manajemen asset yang berupa inventarisasi status penguasaan asset identifikasi dalam mencarii solusi permasalahan legall, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan kelegalan yang ada kaitannya dengan penguasaan ataupun pengalihan asset hal tersebut dinyatakan menurut Doli D. Siregar (2004:519). Legal audit akan diperlukan ketika proses inventarisasi setiap asset yang dimiliki pemerintah daerah memiliki kejelasan status kepemilikan supaya tidak terjadi persengketaan terhadap kepemilikan suatu daerah, yang tercatat sesuai dengan pelaporan yang dilaporkan kepada daerah

Dengan pernyataan tersebut ada hubungannya dengan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah, dan berdampak pada nilai yang diberikan oleh BPK, dan hasil ketika pemeriksaan BPK menunjukkan peningkatan yang sangat baik dengan adanya salah satu opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” kepada pemerintahan daerah Kab. Bandung. Hal ini dapat menggambarkan bahwa laporan keuangan telah memenuhi aspek kualitas informasi atau memiliki tingkat kehandalan dalam proses pengambilan keputusan.

**Tabel I-1**  
**Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung**

Tahun	Opini
2014	WDP = Wajar Dengan Pengecualian
2015	WDP = Wajar Dengan Pengecualian
2016	WTP = Wajar Tanpa Pengecualian
2017	WTP = Wajar Tanpa Pengecualian
2018	WTP = Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber : Wwk.bandung.bpk.go.id

Dari tabel I.1 menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemda Kab. Bandung berhasil meningkatkan kinerja keuangan daerah yang berimbas pada peningkatan kehandalan

laporan keuangan daerah yang diperkuat dengan opini tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari fenomena tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH INVENTARISASI ASET TETAP DAERAH TERHADAP LEGAL AUDIT DAN IMPLIKASI PADA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi kasus pada Pemerintahan Kabupaten Bandung)”.

## 2. Kajian Pustaka

Menurut Doli D. Siregar (dalam Rofingatun, 2016:37), menyebutkan bahwa pengertian aset dapat dibagi menjadi dua model diantaranya:

1. *Asset : Things which belongs to company or persons, and which has a values. Atau anythings having comercial or exchange value that is owned by a business, institution, or individuals.*
2. *Asset values : values of a companys accumulated by addings togethers all it assets. Pengertian ini diambil dari English Law Dictionary yang diterbitkan oleh Patter Collin Publishing.*

Sedangkan Menurut PSAP No. 07 Thn 2010 secara lebih spesifik bahwa yang dimaksud dengan aset tetap adalah “aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam sebuah kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh kebanyakan masyarakat umum.

### 2.1. Inventarisasi Aset Tetap

#### 2.1.1. Pengertian aset Tetap

Inventarisasi yaitu suatu kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Barang inventaris merupakan seluruh barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftarkan dalam buku inventaris, pengertian tersebut menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016.

#### 2.1.2. Jenis- jenis Inventarisasi Aset Tetap

Manajemen aset sendiri terbagi dalam empat tahapan kerja, salah satunya adalah inventarisasi. Inventarisasi aset terdiri atas dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/ legal, pernyataan tersebut menurut Doli D. Siregar (2004:518).

### 2.2. Legal Audit

Menurut Sugiama (2013), pengertian dari audit legal asset yaitu pemeriksaan dalam mendapatkan informasi secara jelas, terutama mengenai status dari kepunyaan suatu barang, system dan procedur penguasaan, pengalihan asset, pengidentifikasian kemungkinan akan terjadinya berbagai permasalahan hukum, serta mencari titik tengah atas permasalahan hukum tersebut. Yang bertujuan sebagai tindakan pengendalian atau tindakan pengamanan, pengurusan dan penertiban barang daerah secara fisik, maupun administratif dan tindakan hukum, pernyataan itu tercantum dalam KEPMENDAGRI No. 11 tahun 2001.

### 2.3. Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Thn 2010 , yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi - transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas laporan . Tujuan dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi- informasi keuangan suatu entitas laporan yang bermanfaat bagi setiap *Stakeholder* yang akan mengambil keputusan.

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1. Metode Penelitian

Sebagaimana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif metode.

#### 3.2. Populasi dan Sample

Yang menjadi populasi pada penelitian ini yaitu seluruh SKPD yang berada di wilayah Pemda Kab. Bandung sebanyak 28 SKPD yaitu sebanyak 2 orang setiap dinas.

#### 3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data subjek dan dokumenter. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder.

#### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara kepada pengelolaan aset tetap daerah Pemkab Bandung dan bidang akuntansi.

#### 3.5. Metode Analisis Data

##### 3.5.1. Analisis model pengukuran (*Outer model*)

Dilakukannya analisis ini yaitu untuk memastikan bahwa ukuran yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran valid dan reliabel.

##### 3.5.1.1. Convergent validity (validitas konvergen)

Nilai Loading faktor harus lebih dari 0,7 atau nilainya Loading factor antara 0.6 sampai 0.7. Serta nilai Average Variance Extracted (AVE) > 0.5 (Ghozali, 2014)".

##### 3.5.1.2. Discriminant validity

Indikator reflektiv bisa dilakukan dengan melihat dari nilai dari Cross Loading untuk setiap variabel diharuskan lebih dari nilai 0.70 dan membandingkan dengan akar kuadrat dari AVE untuk konstruksi dengan nilai korelasi antara konstruksi pada sebuah model, hal tersebut merupakan cara untuk melihat seberapa besar nilai dari *Discriminant Validity*.

##### 3.5.1.3. Uji Reliabilitas

uji reliabilitas dengan cara digunakannya *Compositib rebility*. Yang pada umumnya *rule of the thumb* untuk menilai reliabilitas konstruksi pada Penelitian yang bersifat confirmatory >0,7 dan 2.

##### 3.5.2. Analisis model structural (*inner model*)

Suatu model yang dilakukan untuk memastikan bahwa model structural yang dibangun dapat akurat dan kuat.

##### 3.5.2.1. Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Nilai  $R^2$  yaitu sebesar 0.75; 0.50 dan 0.25 bisa diambil kesimpulan yaitu model tersebut kuat, moderat dan lemah. Sehingga PLS memberikan hasil  $R^2$  untuk mempresentasikan bahwa dari jumlah varian pada setiap konstruksi yang dijelaskan oleh suatu model.

##### 3.5.2.2. Predictive Relevance ( $Q^2$ )

Jika didapatkan nilai sebesar 0,02 maka model tersebut dikatakan lemah, dan jika nilai 0,15 model tersebut moderat dan jika nilai 0.35 maka model dikatakan kuat. Nilai  $Q^2$  akan dihitung secara otomatis melalui menu *Blindfolding* pada SmartPLS. Nilai  $Q^2 < 0$  maka model dikatakan kurang *Predictive Relevance*, dan sebaliknya jika nilai  $Q^2 > 0$  maka model tersebut dikatakan dapat memiliki *Predictive Relevance*.

##### 3.5.3. Uji t sebagai pengujian hipotesis

hipotesis pengujian pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.  $H_0 : \rho_{yx} = 0$ , berarti inventarisasi aset tetap daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2.  $H_a : \rho_{yx} \neq 0$ , berarti inventarisasi aset tetap daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan .
3.  $H_0 : \rho_{yx} = 0$ , berarti audit legal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan .
4.  $H_a : \rho_{yx} \neq 0$ , berarti legal audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
5.  $H_0 : \rho_{zx} = 0$ , berarti inventarisasi aset tetap daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap legal audit
6.  $H_a : \rho_{zx} \neq 0$ , berarti inventarisasi aset tetap daerah berpengaruh signifikan terhadap legal audit

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1. Pengujian Outher model

##### 4.1.1. Uji Convergent Validity

Tabel 1. Outer Loadings

Item	Inventarisasi A...	Kualitas Lapo...	Legal Audit (Z)
X1.1	0.741		
X1.3	0.874		
X1.4	0.908		
X1.5	0.833		
X1.6	0.894		
X1.7	0.908		
Y1.1		0.798	
Y1.10		0.840	
Y1.11		0.737	
Y1.2		0.892	
V1.3		0.895	
Y1.4		0.734	
V1.8		0.776	
Z1.3			0.822
Z1.5			0.886

Dari tabel 1 diatas, diketahui bahwa keseluruhan indikator pada variabel aset tetap daerah, legal audit dan kualitas laporan keuangan memiliki nilai loading convergent validity diatas 0,7.

##### 4.1.2. Uji discriminant Validity

Tabel 2. Diskriminant Validity

Item	Inventarisasi A...	Kualitas Lapo...	Legal Audit (Z)
X1.1	0.741	0.196	0.507
X1.3	0.874	0.405	0.557
X1.4	0.908	0.348	0.582
X1.5	0.833	0.434	0.444
X1.6	0.894	0.342	0.547
X1.7	0.908	0.340	0.499
Y1.1	0.365	0.798	0.356
Y1.10	0.472	0.840	0.397
Y1.11	0.273	0.737	0.436
Y1.2	0.263	0.892	0.260
V1.3	0.244	0.895	0.228
Y1.4	0.184	0.734	0.141
V1.8	0.336	0.776	0.257
Z1.3	0.445	0.326	0.822
Z1.5	0.581	0.350	0.886

Nilai dari Uji discriminant Validity yaitu diatas 0,7 yang artinya hasil tersebut telah sesuai dengan indikator yang baik.

##### 4.1.3. Uji Reliabilitas

Tabel 3. Uji Reliabilitas Model

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Inventarisasi Aset Tetap Daerah (X)	0,930	0,945
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,915	0,931
Legal Audit (Z)	0,635	0,844

Jika nilai Cronbach alpha  $\geq 0,7$  and Cronbach Alpha  $\geq 0,6$  dapat dikatakan model tersebut telah

sesuai dengan indikator Uji Reliabilitas .

**4.2. Pengujian Inner model**

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur tingkat variasi perubahan independent terhadap variabel dependen dan dapat terevaluasi dengan menggunakan R2 untuk construks dependen

**4.2.1. Koefisien determinasi (R2)**

Tabel 4. R. Square

R Square			
Matrix	R Square	R Square Adjusted	
		R Square	R Square Adjusted
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0.199	0.171	
Legal Audit (Z)	0.368	0.357	

R-Square dari variabel Kualitas Laporan Keuangan yaitu 0,199, hasil dari perolehan tersebut menjelaskan bahwa besarnya presentase Kualitas Laporan Keuangan dapat dijelaskan oleh Inventarisasi Aset Tetap Daerah sebesar 19.9%. Selanjutnya nilai R-square dari variabel Legal Audit yaitu sebesar 0.368, hasil dari perolehan tersebut menjelaskan bahwa presentase besarnya legal audit dapat dijelaskan oleh inventarisasi aset tetap daerah dan kualitas laporan keuangan sebesar 36,8%.

**4.2.2. Predictive Relevance (Q2)**

Diketahui perhitungan dari nilai Q-Square dibawah ini dengan penggunaan rumus sebagai berikut ini :

$$\begin{aligned}
 Q\text{-Square} &= 1 - [(1 - R21) \times (1 - R22)] \\
 &= 1 - [(1-0,199) \times (1 - 0,368)] \\
 &= 1 - (0,801 \times 0,632) \\
 &= 1 - 0,506 \\
 &= 0,494
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, bahwa hasil perolehan dari nilai Q-Squaree sebesar 0.494. Ini menunjukkan bahwa besarnya keragaman dari data penelitian yang telah dijelaskan berdasarkan model penelitian sebesar 49,4%.

**4.3. Pengujian Hipotesis Uji t**

Tabel 5. Uji Hipotesiss Model

Path Coefficients						
Mean, STDEV, T-Values, P-Values	Confidence Intervals	Confidence Intervals Bias Corrected	Samples	Copy to Clipboard: Excel Format		
	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O /STDEV)	P Values	
Inventarisasi Aset Tetap Daerah (X) -> Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0.259	0.284	0.120	2.165	0.031	
Inventarisasi Aset Tetap Daerah (X) -> Legal Audit (Z)	0.606	0.594	0.131	4.613	0.000	
Legal Audit (Z) -> Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0.238	0.276	0.152	1.570	0.117	

Pada tabel 5. Diketahui bahwa nilai dari P Values dari masing- masing variabel x, dan y memiliki nilai > 0,05 sehingga bisa dikatakan saling mempengaruhi antara kedua variabel tersebut. Sedangkan P Values dari variabel z memiliki nilai lebih dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh antara variabel z dengan variabel y.

**4.4. Pembahasan**

**4.4.1. Pengaruuh Inventrisasi Asets Tetap Daerah terhadap Kualtas Laporan Keuangan**

ariabel Inventarisasi Aset Tetap memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan dengan nilai t-statistics sebesar 2,165. Sehingga menunjukkan bahwa variabel Inventarisasi Aset Tetap Daerah terhadap diterimanya Kualitas Laporan Keuangan.

**4.4.2. Pengaruh Inventrasasi Asset tetap Daerah terhadap Legall Audit**

variabel Inventarisasi Aset Tetap Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Legal Audit dengan nilai t-statistics nya sebesar 4,613, sehingga menunjukkan bahwa variabel inventarisasi Aset Tetap Daerah terhadap Legal Audit diterima

#### 4.4.3. Pengaruh Legal Audits terhadap kualitas laporan keuangan

variabel terakhir yaitu variabel Legal Audit tidak ada pengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan dikarenakan nilai t-statistics sebesar 0,117 sehingga ditolak.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dilapangan dan pembahasannya yang telah dipaparkan pada rumusan masalah bahwa dari Prosedur Inventarisasi Aset Tetap daerah di setiap dinas sama dilakukan dengan cara mencatat ke dalam laporan inventarisasi sesuai dengan fisik dari inventarisasi tersebut, dapat diperoleh, beberapa kesimpulan yaitu: Pada kenyataan dilapangan telah sesuai dengan hasil yang diteliti yaitu proses inventarisasi Aset tetap Daerah yang dilakukan oleh beberapa Dinas di Pemerintahan Kabupaten Bandung sudah sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh setiap dinas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan cara melakukan pendataan Aset tetap Daerah di setiap dinas- dinas, selanjutnya mencatat keadaan barang daerah ke dalam kartu inventarisasi, setelah itu melakukan pelaporan hasil pendataan dan pencatatan tersebut kepada pihak BKAD kabupaten Bandung.

Dalam penilaian Inventarisasi Aset Tetap Daerah terhadap Kualitas laporan keuangan melalui mediator legal audit dinyatakan sukses hal ini terlihat dari sebuah data hasil penelitian sebelumnya, kenaikannya sudah cukup banyak diantara 70% - 80%. Namun dari sisa persenan tersebut masih ada beberapa yang masih belum melakukan inventarisasi tersebut secara baik dan benar.

Untuk Inventarisasi Aset tetap Daerah tidak begitu mempengaruhi pada kualitas WTP, karena indikator yang mempengaruhi opini tersebut yaitu kondisi keuangan yang dalam keadaan baik, inventarisasi Aset hanya sebagian dari banyak faktor yang akan mempengaruhi baik buruknya kualitas WTP di suatu Pemerintahan Kabupaten Bandung. Menurut hasil temuan LHP terdapat permasalahan yang salah satunya mengenai inventarisasi namun sampai saat ini tahun 2020 Pemda Kab. Bandung masih dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

## Daftar Pustaka

### Sumber Buku

Wareen, Carls., Reeve, M James., Fess, Philips E. 2005. Pengantar Akuntansi. Jakarta : Salemba empat.

### Sumber Peraturan

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar akuntansi Pemerintahan.

BPK. (2016). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2015. Bandung: BPK.

BPK. (2017). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016. Bandung: BPK.

BPK. (2018). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017. Bandung: BPK.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

#### Sumber Lainnya

- Syofyan E., Anshari. (2018). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.
- Sangadji S.M., (2018). Pengaruh Inventarisasi Aset Terhadap Legal Audit dan Penilaian Aset Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Bandung. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D*, Alfabeta. Bandung.
- Martikawati Gubali, J. T. (2018). Analisis penatausahaan barang milik negara melalui penggunaan aplikasi simak BMN pada kantor kementerian agama Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13, 216-224.
- Novita Juwita Andiani, D. W. (2017). Pengaruh penatausahaan dan penerapan sistem informasi (SIMAK BMN) terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada kantor pusat dan kantor wilayah direktorat jenderal kekayaan negara DKI Jakarta). *E-Proceeding of Management*, 4, 2796.
- Rami, M. R. (2014). Pengaruh penatausahaan barang milik aceh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah aceh (studi pada dinas pendapatan dan kekayaan aceh). *Jurnal SI-MEN*, 4, 2.
- Sherly, H. K. (2017). Optimalisasi Pemanfaatan Aset , Inventarisasi, Legal Audit, Penilaian dan Kondisi Aset. Pengaruh Inventarisasi, Legal audit, Penilaian dan Kondisi Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, 2.
- Tri Handayani Amaliah, S. P. (2019). Pengaruh penatausahaan barang milik negara dan penerapan sistem informasi akuntansi barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi*, 6.
- Nasrudin, E. (2015). Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara terhadap Pengelolaan aset Negara. *Jurnal akuntansi*, 13 (2), 45-46.
- Pamfilia Ferdinanda Montayop, W. R. (2017). Faktor- faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap. *Kajian ekonomi dan Keuangan Daerah*, 4.
- Sandeo, A. B. (2018). Pengaruh Manajemen Aset terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada kantor Badan Keuangan Kota Gorontalo. *EE- Journal*.
- Dewi Nur Mayasari, S. (2015). Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan aset Tetap Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah . *Jurnal Akuntansi*.
- Esduo Ramadhano Labasido, D. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah pada Dinas Pengelolaan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4 (2), 218.
- Ismail Gaffar, B. H. (2017). Pengaruh Inventarisasi Aset, Sumber Daya Manusia terhadap Optimalisasi Aset dengan Sistem Informasi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisis*, 166.
- Jamaludin. (2017). Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit, dan Penilaian Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Tanah dan Bangunan Pemerintah Provinsi NTB. *Sekuritas Manajemen Keuangan*, 1.
- John Gamara Tangke, H. G. (2015). Pengaruh Optimalisasi Manajemen Aset Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Negara*, 21, 2.
- Rima Rachmawati, D. A. (2018). Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penatausahaan Asset / Barang Milik Daerah. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10, 191.